

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-Governmental Organization (NGOs)* dinilai sebagai organisasi non-pemerintah yang terlibat secara aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat dalam sebuah negara secara khusus bagi mereka yang tinggal pada level akar rumput/pedesaan, (Clark, 1999). Awalnya sekitar tahun 1970-an, peran LSM tidak begitu mendapatkan perhatian. Namun eksistensi organisasi ini meningkat pesat dalam pembangunan masyarakat, advokasi dan distribusi bantuan pada tahun 1980-an seiring dengan adanya perubahan struktural dalam politik global dan berkembangnya interdependensi.

Pada tahun 1986, 5% dari bantuan yang berasal dari organisasi Internasional OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) terkoneksi dengan LSM, (Clark, 1991, hlm.8-46). Pada tahun 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)* melaporkan bahwa presentase bantuan LSM ke organisasi internasional tersebut naik menjadi 9%, (ECOSOC, 1994:9). Bukan hanya itu, pada tahun 1993, LSM diperkirakan menyumbangkan dana sebanyak USD 9 miliar untuk didistribusikan untuk pembangunan di negara-negara berkembang, (Smille and Helmich, 1993, hlm.14). Aktivitas LSM yang cukup masif ini bukan hanya didorong oleh dukungan pemerintah dan agensi multilateral donor, tapi juga dukungan yang kuat dari individu publik.

Sorotan atas kinerja LSM ini memunculkan berbagai persepsi yang menilai bahwa kegiatan yang dilakukan LSM merupakan sebuah tanda bahwa pemerintah tidak dapat memberikan bantuan, hingga anggapan bahwa tren bantuan yang difasilitasi oleh LSM dapat mengurangi pengeluaran publik negara. Ada juga pengakuan bahwa sektor LSM lebih efisien dan berhasil dalam menyediakan layanan, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai tanggung jawab tunggal pemerintah, (UNDP, 1993:91; Meyer,1992) dan dapat menawarkan pendekatan pembangunan yang inovatif dan berpusat pada masyarakat (Nader dan Foundation, 2016). Selain itu, lembaga donor juga mengakumulasi pengalaman mereka bahwa intervensi pemerintah secara khusus di negara berkembang dalam kerja sama pembangunan internasional menjadi semakin kurang efektif secara spesifik terhadap isu seperti penanganan kemiskinan dan isu sosial lainnya (UNDP, 1993:84). Hal ini menjadi sebuah peluang bagi LSM yang telah memiliki pengaruh kuat melalui rekam jejaknya dalam menangani berbagai isu internasional seperti hak asasi manusia, kemiskinan, lingkungan dan lain sebagainya.

Di Indonesia, keberadaan dan kontribusi LSM dalam pembangunan nasional sudah terlihat sekitar tahun 1970-an, sebagai contoh masuknya LSM Internasional Save the Children ke Indonesia pada tahun 1976. Keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap LSM secara khusus LSM asing semakin meningkat seiring dengan proses demokratisasi yang terjadi pasca kemerdekaan. Menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri RI (2011), puncak masuknya LSM Internasional ke Indonesia adalah sekitar tahun 2004 pada momen terjadinya bencana alam tsunami di Aceh. Informasi ini juga sejalan dengan data yang

ditemukan oleh Edelman sebuah lembaga survei independen di Indonesia, bahwa dalam kurun waktu tahun 2009-2014 terjadi kenaikan secara signifikan 22% jumlah LSM di Indonesia. Masuknya LSM asing dalam suatu negara juga menjadi sebuah tanda keterbukaan negara atas lembaga tersebut untuk menyalurkan bantuan dan membangun proyek dan menemukan solusi alternatif persoalan masyarakat dalam misi pembangunan nasional (Manor, 2004).

Dalam skala nasional, LSM lokal di Indonesia juga berkembang secara sporadis dengan berbagai isu pembangunan. Kepercayaan pemerintah atas kinerja LSM terlihat pada dukungannya dengan memberikan LSM lokal akses terhadap pendanaan yang disediakan pemerintah Indonesia untuk menunjang program kerja LSM. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun dalam tulisan ini, penulis tidak membahas kinerja LSM lokal di Indonesia, sebaliknya akan mengkaji LSM Internasional yang beroperasi di Indonesia. Keyakinan pemerintah pada LSM internasional juga terlihat pada dorongan Kementerian Luar Negeri melalui publikasinya bahwa LSM nasional maupun Internasional dapat menjadi mitra dalam realisasi program-program pemerintah untuk kepentingan nasional (Kementerian Luar Negeri RI, 2018). Yang ingin ditekankan disini adalah pemerintah Indonesia melalui kebijakannya secara eksplicit menyakini bahwa LSM terlepas lokal maupun internasional, LSM memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan nasional Indonesia.

Mengingat bahasan mengenai pembangunan nasional merupakan topik cukup luas yang mencakup lintas sektor, dengan demikian, penulis membatasi

tulisan ini secara spesifik membahas isu pengentasan kemiskinan di Indonesia sebagai salah satu akar permasalahan pembangunan dan kontribusi LSM Internasional sebagai upaya kolektif global. Kinerja LSM internasional dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia termasuk bagian dari kerja sama kolektif global yang disepakati pada tahun 2000 melalui agenda *Millenium Development Goals* yang kemudian dikembangkan menjadi *Sustainable Development Goals* pada tahun 2015 oleh PBB dan lebih dari 190 negara dan organisasi non-negara lainnya. Yang mana pada kesepakatan itu diperkirakan seperenam dari total populasi dunia diperkirakan hidup dalam kemiskinan ekstrim, yang berdampak pada kekurangan gizi dan akses pada kebutuhan dasar lainnya yang terbatas.

Tantangan kemiskinan global direfleksikan oleh Indonesia sebagai negara keempat untuk populasi terbesar di dunia menurut *World Population Review* (2020). Berdasarkan data Bank Dunia, sebanyak 9,8% dari total populasi Indonesia hidup dalam kemiskinan. Dengan demikian, melalui target yang disusun oleh pemerintah melalui kerangka kerja *Indonesia Poverty Reduction Program in Indonesia* yang dirancang oleh Kementerian Bappenas/PPN (2014) memuat bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sektor yang strategis bagi pembangunan nasional Indonesia yang ditargetkan pada 2030 dapat dientaskan setidaknya pada 7,6% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan fenomena dan penjabaran diatas, penelitian ini akan memberikan pembahasan mengenai kontribusi LSM internasional yang beroperasi di Indonesia serta peranannya dalam mendukung pemerintah guna mengentaskan persoalan kemiskinan melalui pendekatan, inovasi, strategi pembangunan dan

keahlian yang dimiliki. Guna mendapatkan kajian yang mendalam, penulis dalam hal ini mengamati Save the Children Internasional sebagai salah satu LSM internasional yang beroperasi cukup lama di Indonesia dengan fokus pada perlindungan hak anak dan keluarga yang pada umumnya menyasar mereka yang hidup dalam kemiskinan dan termarginalkan.

Berdasar pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dengan demikian maka didapatkan 2 (dua) pertanyaan sekaligus menjadi menjadi landasan analisis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengapa LSM Internasional menjadi aktor yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia?
- 2) Bagaimana mekanisme kerja sama antara LSM Internasional dan pemerintah Indonesia berdasarkan pengamatan dari Save the Children Internasional?

1.2.Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini akan menganalisis kinerja LSM serta memahami hubungan kedua aktor negara dan non-negara LSM dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Analisis yang dimuat dalam tulisan ini juga termasuk mengenai mekanisme yang digunakan oleh kedua belah pihak sehingga dapat diketahui posisi strategis LSM internasional dalam pemerintahan Indonesia. Tidak hanya relasi dan mekanisme kerja sama kedua belah pihak, dalam tulisan ini juga akan menjabarkan major program LSM Internasional di Indonesia yang diamati melalui Save the Children Internasional (SCI) yang berkaitan dengan upaya

pengentasan kemiskinan. Program-program kerja yang dibahas dalam tulisan ini digunakan sebagai bukti konkrit kontribusi LSM Internasional dalam pembangunan Indonesia.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada dua kategori, yakni: akademis dan praktis kontribusi pemikiran yang disampaikan dalam tulisan ini khususnya dalam bidang pembangunan internasional. Dua kategori manfaat yang dimaksudkan penulis akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan mengenai relasi dan kerja sama yang terjalin antara Indonesia sebagai aktor negara dan LSM Internasional sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional, terlebih pada mekanisme kerja sama diantaranya keduanya dalam hal pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga akan meneguhkan pemahaman teori liberalisme akan keyakinannya dalamnya dalam peran non aktor dalam pembangunan dunia, melalui bukti yang dijabarkan dalam hasil penelitian ini.
2. Praktis. Dalam praktik hubungan internasional maupun pembangunan internasional, penelitian ini diharapkan dalam membantu para praktisi pembangunan melakukan evaluasi dan meningkatkan performa kinerja mereka, secara khusus SCI sebagai studi kasus yang diamati dalam penelitian ini.